

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi ekonomi mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor bisnisnya setiap tahunnya. Persaingan di sektor ini, khususnya di kalangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) tidak dapat dipungkiri. UMKM telah muncul sebagai kekuatan penting dalam meningkatkan perekonomian negara, memperluas jangkauannya bahkan hingga ke daerah-daerah paling terpencil sekalipun. Pada tahun-tahun terakhir, perusahaan-perusahaan ini sudah menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM Indonesia, UMKM menyumbang 61% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) serta memberikan lapangan kerja untuk 97% angkatan kerja negara. Pemberdayaan UMKM merupakan pendekatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan landasan perekonomian dan mengangkat taraf hidup sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan (Merdekawati & Rosyanti, 2020).

Bali menjadi satu diantara provinsi dengan perkembangan UMKM yang cukup signifikan dari setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Bali selama triwulan III tahun 2023 tumbuh sebesar 5,35%, dimana pertumbuhan tersebut didukung oleh kontribusi UMKM. Peningkatan UMKM ini terjadi hampir di setiap Kabupaten di provinsi Bali, salah satunya

adalah Kabupaten Buleleng. Berikut ini merupakan data pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng periode 2019-2022.

Tabel 1.1 Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng

| No. | Klasifikasi Usaha | Tahun | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Usaha Mikro | 26.048 | 44.670 | 47.311 | 55.173 |
| 2. | Usaha Kecil | 9.294 | 9.576 | 9.654 | 10.827 |
| 3. | Usaha Menengah | 196 | 226 | 234 | 351 |
| 4. | Usaha Besar | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Total | | 35.555 | 54.489 | 57.216 | 66.368 |

(Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, 2024).

Data menunjukkan bahwasanya pada tahun 2019 jumlah persebaran UMKM di Kabupaten Buleleng mencapai 35.555 UMKM. Kemudian di tahun 2020 persebaran UMKM meningkat sangat drastis, banyak masyarakat di PHK karena virus Covid-19. Sebagian masyarakat mulai beralih membuka peluang usaha baru. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan yang cukup dratis sebanyak 18.934 sehingga menjadi 54.489 UMKM. Pada tahun 2021 persebaran jumlah UMKM meningkat sebanyak 2.727 dari tahun sebelumnya sehingga mencapai 57.216 UMKM. Kemudian tahun 2022 persebaran jumlah UMKM mengalami peningkatan signifikan mencapai 9.152 UMKM sehingga jumlah total UMKM menjadi 66.368 UMKM. Berikut merupakan perkembangan izin usaha UMKM di Kabupaten Buleleng per Kecamatan pada tahun 2022.

Tabel 1.2 Data Perkembangan Izin Usaha UMKM Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2022

| No. | Kecamatan | Klasifikasi Usaha | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah |
| 1. | Kec. Banjar | 152 | 12 | 2 |
| 2. | Kec. Buleleng | 837 | 358 | 1 |
| 3. | Kec. Busungbiu | 82 | 6 | - |
| 4. | Kec. Gerokgak | 350 | 17 | 5 |
| 5. | Kec. Kubutambahan | 153 | 5 | - |
| 6. | Kec. Sawan | 173 | 10 | 8 |
| 7. | Kec. Seririt | 139 | 53 | - |
| 8. | Kec. Sukasada | 291 | 19 | 7 |
| 9. | Kec. Tejakula | 97 | 7 | 1 |
| Total | | 2.274 | 487 | 24 |

(Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng, 2024).

Data menunjukkan bahwa IUMK pada tahun 2022, di Kabupaten Buleleng mencapai 2.785 yang sudah terdaftar. Dengan adanya IUMK ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum berupa legalitas usaha yang dapat melindungi hak usaha dan sebagai alat pemberdayaan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, dengan IUMK ini dapat memberikan akses lebih mudah dari program-program pemerintah dan dukungan - dukungan lainnya.

Perkembangan UMKM yang signifikan dan berbagai kontribusi yang diberikan untuk perekonomian nasional. Pesatnya pertumbuhan UMKM terhambat oleh tantangan yang terus-menerus (closed loop problem) yang belum terselesaikan. Tantangan tersebut antara lain permasalahan perihal pembiayaan bisnis, manajemen keuangan, motivasi pebisnis UMKM, teknologi, serta berbagai kendala yang lain (Wismanjaya & Werastuti, 2022).

Kinerja usaha ialah strategi yang didasarkan pada orientasi kewirausahaan, yang memerlukan sumber daya modal guna menguji dan mengembangkan ide-ide baru, mengeksplorasi kesempatan pasar baru, dan mengarahkan strategi di pasar tertentu (Putra et al., 2021). Kinerja suatu UMKM merupakan cerminan langsung dari upaya individu dan dapat dinilai berdasarkan tugas yang diselesaikan, selaras dengan ukuran nilai atau standar yang ditetapkan oleh UMKM tersebut. (Aribawa, 2016). Oleh karena itu, kinerja UMKM harus diberikan perhatian khusus agar UMKM dapat berkembang dan mampu menghadapi persaingan.

Dengan memiliki kinerja usaha yang baik akan berpengaruh cukup signifikan bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan akses pinjaman kredit ke lembaga keuangan. Berdasarkan data Laporan Perekonomian Bali tahun 2024. Pada tahun 2023, rata-rata nilai NPL kredit mayoritas UMKM di setiap kabupaten/kota di provinsi tersebut melampaui nilai NPL nasional sebesar 2,19% yang tercatat pada Desember 2023. Peningkatan nilai NPL kredit UMKM ini menandakan bahwa sejumlah besar peminjam UMKM menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban kreditnya, termasuk pembayaran kembali bunga dan jumlah pokok pinjaman yang masih wajib dibayarkan sesuai persyaratan yang disepakati. Di bawah ini disajikan persentase nilai rerata NPL kredit UMKM di Provinsi Bali selama periode 2023.

Tabel 1.3 Non-Performing Loan (NPL) Kredit UMKM di Provinsi Bali

| No. | Kabupaten/ Kota | 2023 | | | | Rata-rata (%) |
|-----|-----------------|------|------|------|------|---------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1. | Kota Denpasar | 3.25 | 3.01 | 2.73 | 2.49 | 2.87% |
| 2. | Kab. Badung | 1.59 | 2.46 | 1.80 | 1.65 | 1.87% |
| 3. | Kab. Gianyar | 0.69 | 1.77 | 1.80 | 0.87 | 1.28% |
| 4. | Kab. Buleleng | 3.73 | 3.01 | 3.03 | 2.99 | 3.19% |
| 5. | Kab. Tabanan | 1.89 | 1.43 | 1.87 | 1.88 | 1.76% |
| 6. | Kab. Karangasem | 4.12 | 3.91 | 3.58 | 3.07 | 3.67% |
| 7. | Kab. Jembrana | 2.16 | 1.16 | 0.93 | 0.65 | 1.22% |
| 8. | Kab. Bangli | 1.67 | 1.15 | 1.23 | 0.47 | 1.13% |
| 9. | Kab. Klungkung | 4.33 | 3.95 | 4.15 | 0.97 | 3.35% |

(Sumber: Bank Indonesia, 2024).

Data menunjukkan, tiga UMKM unggulan di Provinsi Bali tahun 2023 yang mengalami tingkat Kredit Non Performing Loan (NPL) tertinggi berada di Kabupaten Karangasem, Klungkung, serta Buleleng. UMKM Kabupaten Buleleng menduduki peringkat ketiga dalam nilai NPL kredit dengan persentase rata-rata sebesar 3,19%. Nilai NPL yang tinggi ini menandakan tantangan yang dihadapi para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban kreditnya seperti yang telah disepakati sebelumnya. Kombinasi kinerja bisnis yang di bawah standar dan penurunan pendapatan berkontribusi besar terhadap kesulitan ini. Penurunan pendapatan secara tidak langsung menyebabkan kesulitan dalam pembayaran kembali pinjaman sehingga berdampak pada kenaikan NPL (Jalih & Rani, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng masih terbilang cukup rendah. Rendahnya kinerja UMKM ini menyebabkan rata-rata persentase nilai NPL kredit mencapai 3,19%, tertinggi ketiga di Bali.

RBV (Resource Based View Theory) yang dikenalkan oleh Wernerfelt tahun 1984 menawarkan penjelasan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Menurut Teori RBV, sumber daya suatu

perusahaan memiliki peran signifikan pada pengembangan strategi yang mengarah pada keunggulan kompetitif dan peningkatan kinerja. Sumber daya ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: sumber daya modal fisik (sebagaimana alat-alat, teknologi, akses pada bahan mentah dan tempat bisnis), sumber daya modal manusia (khususnya keterampilan, kemampuan intelektual individu dan pengalaman dalam organisasi), dan sumber daya modal organisasi (meliputi sistem perencanaan, struktur pelaporan serta pemantauan internal dan eksternal).

Relevansi teori dalam penelitian ini adalah kinerja UMKM dipengaruhi oleh sumber daya modal berupa akses permodalan sebagai bahan utama untuk menunjang kinerja UMKM dan *payment gateway* sebagai bentuk pemanfaatan teknologi untuk kemudahan pembayaran bagi UMKM. Kemudian sumber daya yang utama lainnya berupa literasi keuangan sebagai pengendali dan penentu keputusan dalam berjalannya usaha. UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki permasalahan terkait akses permodalan yang masih terkendala dan penerapan *payment gateway* yang belum optimal, ditambah masih minimnya literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM sehingga berdampak kepada kinerja UMKM.

Kinerja UMKM membutuhkan perilaku pengelolaan keuangan yang optimal. Salah satu teori yang sering diterapkan dalam penelitian tentang pengelolaan keuangan adalah Teori Perilaku Pengelolaan Keuangan. Teori ini menggambarkan kemampuan seseorang dalam merencanakan, membuat anggaran, menilai pengelolaan, mengendalikan, mencari, dan menyimpan dana harian (Kholilah & Iramania, 2013). Sehubungan dengan hal tersebut,

relevansi teori pada riset berikut ialah dengan memiliki sikap pengelolaan finansial yang baik pastinya bisa mengoptimalkan kinerja UMKMnya sendiri. Makanya, perilaku pengelolaan keuangan penting untuk dilakukan. Jika sebagian besar UMKM gagal mengelola keuangannya secara efektif, mereka biasanya tidak memiliki pendekatan sistematis dalam mengelola keuangannya (Aribawa, 2016). Perilaku pengelolaan keuangan yang paling efektif dicapai dengan mengedukasi UMKM mengenai keuangan yang benar.

Literasi keuangan adalah kapasitas untuk memahami pengelolaan keuangan yang efektif sebagai bentuk pengambilan keputusan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bisnis dan pelanggannya (Daud et al., 2023). Berdasarkan hasil SLINK pada tahun 2022, diketahui bahwa Provinsi Bali memiliki tingkat literasi keuangan hanya mencapai 57,66%. Sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 92,21% sehingga terjadi gap sebesar 34,55%. Tingkat literasi keuangan di Bali masih mengalami kesenjangan cukup signifikan dan belum mampu dalam mengikuti tingkat inklusi keuangan. Hal ini terlihat dari tingkat penggunaan layanan keuangan pada lembaga keuangan oleh pelaku UMKM yang tidak dimanfaatkan dengan optimal. Persentase tersebut berkisar antara 60% hingga 70% dari semua MKM yang tidak mempunyai manajemen finansial di bank. (Sriani dkk.2022).

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa dari 20 pelaku UMKM, diketahui sebesar 65% pelaku UMKM tidak memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usahanya. Sementara itu, 35% lainnya sudah mampu mengelola keuangannya dengan tidak menggabungkan keuangan pribadi dan

keuangan usaha. Disamping itu, hasil observasi awal juga menunjukkan bahwa sebesar 25% pelaku UMKM melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK. Sementara itu, sebesar 45% pelaku UMKM mencatat laporan keuangan secara manual dan sederhana, sedangkan 30% lainnya tidak konsisten dalam mencatat laporan keuangan usaha. Literasi keuangan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng rendah. Banyak yang menggabungkan keuangan usaha dan pribadi, kurang melakukan pencatatan keuangan sesuai standar SAK, menghambat akses modal dan kinerja UMKM. Padahal pelaporan keuangan ini dapat menjadi kunci untuk memperoleh akses modal.

Wismanjaya dan Werastuti (2022) menemukan bahwa literasi keuangan berperan penting dalam keberhasilan UMKM di Kabupaten Buleleng, sedangkan Suardana dan Musmini (2020) menemukan dampak positif serupa dari literasi keuangan terhadap UMKM dalam konteks yang lebih luas. Penelitian Saputra (2022) berfokus secara khusus di Kabupaten Karanganyar dan menyatakan ada dampak signifikan positif literasi keuangan pada keberhasilan UMKM. Namun Prasetyo dan Farida (2022) melakukan penelitian berbeda yang mengungkapkan adanya korelasi negatif antara pengetahuan keuangan dengan keberhasilan UMKM.

Komponen UMKM yang mempengaruhi kinerjanya adalah ketersediaan modal. Akses terhadap permodalan menjadi satu diantara aspek yang bisa berdampak pada kinerja UMKM (Suardana & Musmini, 2020). Modal sangat penting bagi operasional usaha UMK dan digunakan oleh mereka untuk mengembangkan dan menjalankan usahanya. Kajian Bank Indonesia pada tahun 2022 mengungkapkan, 69,5% UMKM belum menerima

pinjaman. Hambatan ini berasal dari rendahnya pengetahuan keuangan peminjam atau pelaku usaha kecil. Selain itu, peminjam (bank dan lembaga keuangan) memiliki beberapa hambatan yang harus diatasi untuk membantu UMKM. Rendahnya literasi keuangan berdampak pada prosedur pencatatan laporan keuangan yang masih sederhana dan tidak mengikuti SAK. Sebenarnya pembukuan yang terorganisir memudahkan pemberian layanan keuangan yang lebih luas kepada UMKM, seperti pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Mawarsari, 2023). Dengan permasalahan tersebut, pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng akan sulit mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya, bahkan tidak sedikit sampai harus mengalami gulung tikar. Selain itu, akses terhadap modal dibatasi oleh tingginya suku bunga dan kurangnya jaminan bagi usaha kecil. (Mahardika, 2020).

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa dari 20 pelaku UMKM, diketahui hanya 30% pelaku UMKM yang mendapatkan akses permodalan ke lembaga keuangan. Sementara itu, sebesar 15% memiliki modal untuk usaha sendiri tanpa melakukan pinjaman ke lembaga keuangan serta sebesar 55% pelaku UMKM terkendala akses permodalan ke lembaga keuangan. Terlihat masih banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang merasakan kendala akses modal ini dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat dari lembaga keuangan seperti laporan keuangan usaha. Keterhambatan akses permodalan ini akan menyebabkan penurunan tingkat produktivitas karena tidak bisa mengembangkan dan memperluas usahanya. Akses permodalan yang lancar memungkinkan UMKM untuk mengoptimalkan

keuntungan atau penjualan, serta kenaikan modal ialah indikasi dari kenaikan kinerja (Masithah, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wismanjaya dan Werastuti (2022), ketersediaan modal memberikan dampak yang menguntungkan terhadap prestasi UMKM di Kabupaten Buleleng. Senada dengan itu, Suardana dan Musmini (2020) melakukan penelitian yang menegaskan adanya pengaruh positif aksesibilitas modal terhadap keberhasilan UMKM di wilayah yang sama. Sebaliknya, penelitian Oktariani (2022) memberikan hasil berbeda yang menunjukkan bahwa aksesibilitas modal tidak ada hubungannya dengan keberhasilan UMKM di Kota Batu. Larasati (2018) menyatakan aksesibilitas modal tidak berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan UMKM di Surabaya.

Komponen lain yang mempengaruhi kinerja UMKM adalah metode pembayaran. Pada tahun 2022, Kemenkop dan UKM memperkirakan banyaknya UMKM digital sejumlah 20,76 juta. Angka tersebut naik 26,6% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 16,4 juta UMKM. Artinya, 32,44% dari 64 juta unit UMKM sudah mengadopsi platform digital (Rizaty, 2022). Penciptaan ekosistem digital untuk transaksi keuangan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi aktivitas keuangan terkait kartu pembayaran. Menurut Kurniawan et al. (2018), *payment gateway* ialah sistem pembayaran online yang menyediakan informasi transaksi yang oleh merchant. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (sebagaimana dilaporkan oleh Lestari et al., 2020), penggunaan fintech

di Indonesia didominasi oleh *payment gateway*, dengan persentase pengguna mencapai 42,22%.

Hampir semua kalangan saat ini mulai beralih menggunakan *payment gateway*, dari masyarakat umum sampai pelaku UMKM. Dengan ini pemerintah gencar menggerakkan pelaku UMKM untuk mengaplikasikan *payment gateway*. Hal ini terbukti sejak virus Covid-19 melanda, banyak usaha mikro yang mengadopsi metode pembayaran digital dalam melakukan transaksi dengan konsumen. Selama pandemi Covid-19, terjadi peningkatan transaksi elektronik yang meningkat tajam sebanyak 66%, sementara penggunaan sistem pembayaran digital meningkat 37,8%. (Ulya, 2020). Pertumbuhan uang elektronik di Provinsi Bali pada triwulan IV 2023 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 9.56% (Bank Indonesia, 2023). Intensitas penggunaan uang elektronik diharapkan mampu untuk meningkatkan layanan *payment gateway* lebih bersifat inklusif. Peningkatan layanan maupun aplikasi keuangan digital lainnya dapat mempermudah proses pembayaran yang dilakukan pelaku UMKM. Dengan penerapan *payment gateway* diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng.

Dari 20 pelaku UMKM, diketahui sebesar 60% sudah menerapkan sistem pembayaran digital berupa *payment gateway*. Sementara itu, sebesar 40% lainnya belum menerapkan *payment gateway*. Dengan hasil observasi ini, masih belum semua pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng beralih dan menerapkan layanan *payment gateway*. Pelaku UMKM yang belum menerapkan *payment gateway* cenderung masih menerapkan pembayaran

tradisional dikarenakan minimnya pengetahuan dan literasi keuangan sehingga tidak memahami cara menerapkan *payment gateway* ke dalam usahanya. Meskipun demikian, tidak sedikit pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng sudah mulai beralih dan menerapkan *payment gateway* ke dalam usahanya yang dibuktikan dengan observasi awal sebesar 60%. Penerapan *payment gateway* ini dapat meningkatkan permintaan dan volume penjualan dengan kemudahan akses pembayaran digital sehingga berdampak baik untuk kinerja UMKM.

Bersumber Lestari (2020), *payment gateway* berefek positif terhadap pendapatan UMKM. Maysaroh dan Diansyah (2022) menemukan dampak signifikan dan positif *payment gateway* pada kinerja UMKM, tetapi Bastian (2020) menyimpulkan bahwa gateway pembayaran berdampak negatif pada kinerja usaha kecil..

Penelitian yang disampaikan di sini didasarkan pada riset yang dijalankan Wardani (2022) yang mengkaji bagaimana akses permodalan mempengaruhi kinerja usaha UMKM, dengan literasi keuangan menjadi variabel penyesuaiannya. Yang membedakan penelitian ini adalah diperkenalkannya variabel independen baru: gateway pembayaran. Lain halnya dengan riset terdahulu, riset berikut memilih mengambil lokasi di Kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Pringapus, Semarang. Dengan mengingat informasi tersebut, tujuan riset berikut ialah guna mengeksplorasi dampak berbagai aspek terhadap UMKM dengan judul “**Literasi Keuangan Sebagai Moderasi**

Pengaruh Akses Permodalan Dan *Payment Gateway* Terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan pada riset berikut meliputi:

1. Bobot NPL Kredit di Provinsi Bali tahun 2023, menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng menduduki posisi ketiga untuk nilai NPL Kredit tertinggi dengan persentase rata-rata sebesar 3.19%.
2. SLINK tahun 2022, menyatakan bahwa Provinsi Bali memiliki tingkat literasi keuangan masih 57,66% termasuk tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi awal, bahwa 65% pelaku UMKM tidak mengorganisasikan keuangan personal dan keuangan bisnisnya. Selain itu, hanya 25% pelaku UMKM yang menjalankan pencatatan laporan finansial sesuai dengan SAK.
3. Survei Bank Indonesia menyatakan bahwa sebesar 69,5% UMKM belum menerima pinjaman. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa 55% pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng masih kesulitan saat akses permodalan, ditambah literasi keuangan yang masih cukup rendah menyebabkan akses permodalan menjadi terhambat.
4. Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng masih banyak yang belum mengimplementasikan *payment gateway*. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa 40% belum menerapkan *payment gateway* dikarenakan minimnya literasi keuangan sehingga peralihan menuju ekosistem digital masih terhambat.

1.3. Pembatasan Masalah

Tujuan batasan permasalahan ialah guna mereduksi isu menjadi fokus pada subjek yang merupakan sebuah fenomena, dan bukannya mencoba untuk menyebarkan isu tersebut. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan yaitu pengaruh akses permodalan dan *payment gateway* pada kinerja UMKM dengan literasi keuangan sebagai moderasinya. Selain itu, investigasi ini juga fokus pada UMKM di Kabupaten Buleleng..

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dari masalah diatas meliputi:

1. Apakah akses permodalan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah *payment gateway* berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah literasi keuangan mampu memoderasi akses permodalan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng?
4. Apakah literasi keuangan mampu memoderasi *payment gateway* terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Bersumber pemaparan diatas, maka tujuan riset berikut meliputi:

1. Guna memahami akses permodalan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng.
2. Guna memahami *payment gateway* berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng.

3. Guna memahami literasi keuangan mampu memoderasi akses permodalan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng.
4. Guna memahami literasi keuangan mampu memoderasi *payment gateway* terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Bersumber pemaparan diatas, maka manfaat riset berikut meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana akses permodalan dan gateway pembayaran, yang dipengaruhi oleh literasi keuangan, berdampak pada keberhasilan UMKM di Kabupaten Buleleng. Selain itu, diharapkan dapat berfungsi menjadi sumber daya yang berharga guna upaya riset di masa depan dan memberikan bahan tambahan bagi pembaca yang mencari informasi tambahan mengenai pokok bahasan tersebut.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil riset berikut harapannya bisa dijadikan pedoman untuk pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja UMKM di wilayahnya serta dengan pemberdayaan UMKM akan literasi keuangan yang berdampak baik untuk kinerja UMKM.

2. Bagi UMKM

Sebagai acuan dalam menentukan langkah akses permodalan dan *payment gateway* serta dibutuhkan akan literasi keuangan yang optimal guna menunjang keberlangsungan kinerja UMKM.

3. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Memberikan tambahan sumber perpustakaan dan menjadi sumber informasi yang berharga bagi mahasiswa dan pembaca, khususnya terkait dampak literasi keuangan pada kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Bahkan, temuan berikut harapannya bisa berkontribusi pada peningkatan akses terhadap permodalan dan gerbang pembayaran.

